

## ANALISIS RESEPSI MAHASISWA PADA FILM DOKUMENTER “DIRTY VOTE” TENTANG ISU - ISU KECURANGAN PEMILU (STUDI PADA MAHASISWA ILMU KOMUNIKASI YUDHARTA PASURUAN)

**Khorita Apriliya Saputri<sup>1</sup>, Ninuk Riswandari<sup>2</sup>**

Universitas Yudharta Pasuruan

### ARTICLE INFO

#### Article history:

Received Agustus 2024

Revised Agustus 2024

Accepted Agustus 2024

Available online Agustus 2024

Korespondensi: Email :  
khoritaapriya@gmail.co  
m



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.  
Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas  
Pendidikan Ganesha.

### ABSTRAK

Pemilihan umum merupakan sebuah fenomena besar. Lahirnya film Dokumenter Dirty Vote menjadi penanda bahwa pemilu 2024 dipenuhi kecurangan. Penelitian ini menganalisis isu-isu kecurangan dalam film dokumenter Dirty Vote yang disutradarai oleh Dandhy Dwi Laksono menggunakan analisis resepsi Stuart Hall. Hasil analisis menunjukkan bahwa audiens memaknai pesan film ini yang menjelaskan tentang kecurangan-kecurangan dalam pemilu 2024. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana analisa resepsi Mahasiswa Ilmu Komunikasi Yudharta Pasuruan dalam memaknai isu-isu kecurangan yang ditampilkan dalam film Dirty Vote. Analisis resepsi Stuart Hall juga mengungkapkan posisi pemaknaan yang berbeda didasari oleh kerangka pengetahuan dan relasi produksi. Penelitian ini memberikan kontribusi pada pemahaman konsep kecurangan dalam karya dokumenter serta membuka ruang untuk studi lebih lanjut dalam analisis resepsi. Kesimpulan penelitian ini

memberikan wawasan mendalam terhadap aspek-aspek analisis resepsi dalam film dokumenter dan memberikan dasar untuk refleksi lebih lanjut terkait penggunaan analisis resepsi Stuart Hall dalam memahami fenomena pemilu.

Kata kunci: Analisis Resepsi, Film Dokumenter, Isu Kecurangan Pemilu

### ABSTRACT

*General elections are a significant phenomenon. The emergence of the documentary film Dirty Vote serves as an indicator that the 2024 election is rife with fraud. This study examines the issues of fraud in the documentary film Dirty Vote, directed by Dandhy Dwi Laksono, using Stuart Hall's reception analysis. The analysis results indicate that the audience appreciates the message of this film, which explains the various forms of fraud in the 2024 election. The objective of this research is to determine how Communication Science students at Yudharta Pasuruan University interpret the issues of cheating portrayed in the film Dirty Vote through reception analysis. The analysis of Stuart Hall's reception also reveals the different positions of interpretation based on the framework of knowledge and production relations. This research contributes to the understanding of the concept of fraud in documentary works and opens up opportunities for further study in reception analysis. The conclusion of this research provides a profound insight into the aspects of reception analysis in documentary films and lays the foundation for further reflection on the use of Stuart Hall's reception analysis in understanding the phenomenon of elections.*

*Keywords: reception analysis, documentary film, electoral fraud issue*

### PENDAHULUAN

Indonesia merupakan sebuah negara yang menerapkan sistem demokrasi, sebagaimana dinyatakan dalam pasal 1 Undang-Undang Dasar 1945. Demokrasi merupakan suatu sistem pemerintahan yang diciptakan oleh masyarakat dan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan serta kepentingan masyarakat itu sendiri. Sistem demokrasi berlandaskan pada prinsip kedaulatan



rakyat.. Demokrasi memiliki dua prinsip dasar yang berkaitan, yaitu kebebasan (liberty) dan kesetaraan (equality). Penyelenggaraan pemilihan umum untuk mengisi jabatan-jabatan tertentu merupakan sebuah cara yang saat ini dilakukan sebagai perwujudan untuk melaksanakan kedaulatan rakyat.

Sehingga saat ini pelaksanaan kedaulatan rakyat dapat diwujudkan dengan penyelenggaraan pemilihan umum untuk pengisian jabatan tertentu. Oleh karena itu, Pelaksanaan kedaulatan rakyat melalui pemilihan umum adalah manifestasi dari penerapan prinsip-prinsip demokrasi di negara ini. (Surbakti, 2008:15).

Tahun 2024 adalah tahun politik Indonesia. Hal ini dikarenakan pesta demokrasi yang dilaksanakan melalui Pemilihan Umum (Pemilu) pada tanggal 14 Februari 2024. Tanggal 13 November 2023, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah secara resmi mengumumkan tiga pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden yang akan berkompetisi pada Pemilu 2024.

Pasangan calon / paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, telah menjadi topik hangat dan menarik perhatian berbagai kalangan masyarakat. Pencalonan Gibran, putra sulung Jokowi, menimbulkan polemik di dunia politik Indonesia dan menimbulkan kecurigaan publik terkait keinginan kepala negara untuk membangun sebuah dinasti politik. Kontroversi ini muncul karena adanya protes dari masyarakat terkait keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90 Tahun 2023 yang berhubungan dengan Perubahan ketentuan mengenai usia untuk calon presiden dan calon wakil presiden, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, telah memicu berbagai reaksi dari berbagai komunitas dan organisasi. Kontroversi ini telah mendorong sejumlah tindakan nyata yang dilakukan oleh mereka.

Berbagai aksi nyata dilakukan oleh mahasiswa untuk menentang pencalonan Gibran yang dianggap telah menabrak konstitusi. Contohnya: Aliansi Mahasiswa Provinsi Banten menyelenggarakan mimbar bebas dengan memakai topeng Guy Fawkes sebagai simbol perlawanan terhadap dinasti kekuasaan; ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Front Mahasiswa Demokrasi melakukan demo untuk menolak putusan MK di depan bundaran patung kuda Monas; selain melakukan demo, BEM UI mewakili berbagai BEM kampus lain mengajak masyarakat sipil untuk ikut dalam konsolidasi dan diskusi.

Film dokumenter *Dirty Vote* adalah salah satu aksi nyata kolaborasi dari masyarakat sipil sebagai bentuk protes dan ungkapan ketidakpuasan terhadap pemilu 2024. *Dirty Vote* adalah sebuah film dokumenter yang dibuat dengan tujuan untuk memberikan pendidikan kepada masyarakat umum mengenai indikasi-indikasi kecurangan serta mengidentifikasi para pelaku di balik kecurangan tersebut. Dandhy (2024) mengatakan bahwa film ini berfungsi untuk memperkuat keyakinan masyarakat bahwa kecurangan itu memang ada dan dapat dirasakan.

Film dengan durasi 1 jam 57 menit dan 21 detik ini diluncurkan secara daring melalui platform media sosial Youtube PSHK (Pusat Studi Hukum dan Kebijakan) pada 11 Februari 2024, bertepatan dengan masa tenang, yaitu tiga hari sebelum hari pemungutan suara. Film ini mengungkap tentang dugaan kecurangan dalam pemilu 2024. Film ini menyoroti berbagai alat kekuasaan yang diterapkan untuk meraih kemenangan dalam pemilu serta merusak sistem demokrasi.

Film *Dirty Vote* menyoroti indikasi adanya kecurangan dalam proses pemilihan presiden dengan memanfaatkan fakta dan data yang telah beredar di publik. Beberapa kecurangan pemilu 2024 yang dikemas dalam film *Dirty Vote* ini sebagai berikut :

1. Analisis komparatif suara di Palu, Sumatera, untuk pemilu 2019 dan 2024 menunjukkan bahwa Joko Widodo dan Prabowo Subianto diperkirakan akan mendapatkan keuntungan dari koalisi mereka dalam pemilu 2024 yang akan datang.
2. Pemekaran Papua yang mengubah jumlah provinsi dari 2 menjadi 6 provinsi baru akan langsung berpartisipasi dalam pemilu 2024, analisis suara diprediksi akan memberikan dukungan kepada pasangan calon presiden dan wakil presiden dengan nomor urut 2.



3. Penunjukan pejabat gubernur dan pejabat bupati/walikota yang disinyalir tidak memenuhi aturan-aturan yang berlaku.
4. Para menteri yang masih aktif dianggap tidak bersikap netral karena terlibat dalam tim kampanye tanpa mengajukan cuti. Selain itu, beberapa menteri yang menjadi bagian dari tim kampanye secara jelas menunjukkan dukungan mereka terhadap salah satu pasangan calon, yang dapat dilihat dari data lengkap tim kampanye untuk pasangan calon 1 hingga 3.
5. Penyalahgunaan bantuan sosial (bansos) yang dimanfaatkan sebagai instrumen politik dan kampanye, di mana anggaran bansos tahun 2024 lebih tinggi dibandingkan dengan dana bansos selama masa pandemi Covid-19.
6. Bawaslu dan KPU yang dianggap tidak kompeten.
7. Kronologi lengkap mengenai beberapa hakim Mahkamah Konstitusi yang diduga melanggar kode etik soal karena telah mengabulkan gugatan nomor 90/PUU-XXI/2023 MK yang memodifikasi batas usia untuk pencalonan presiden dan wakil presiden dan berakhir dengan keberhasilan Gibran Rakabuming Raka sebagai kandidat wakil presiden nomor urut 2.

Dugaan-dugaan kecurangan tersebut menjadi perbincangan yang menarik terutama pada lingkup mahasiswa. Para mahasiswa dari berbagai universitas mengadakan acara menonton bersama (nobar) dan diskusi terbuka.

Berdasarkan fenomena-fenomena yang telah diuraikan, penulis merasa terdorong untuk mengeksplorasi analisis resepsi di kalangan mahasiswa Ilmu Komunikasi Yudharta Pasuruan pada film dokumenter *Dirty Vote* tentang isu-isu kecurangan pemilu dan bagaimana posisi pemaknaan mahasiswa Ilmu Komunikasi Yudharta Pasuruan pada film dokumenter *Dirty Vote* tentang isu-isu kecurangan pemilu. Resepsi mahasiswa terhadap isu-isu kecurangan akan ditinjau lebih dalam menggunakan metode analisis resepsi Stuart Hall yang akan melalui tahap encoding dan decoding.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Representasi

Dalam memproduksi teks, media tidak menyampaikan makna atau mencerminkan realitas, melainkan menghasilkan "representasi". Konten media berasal dari pengalaman aktual individu dan disajikan kepada audiens sebagai representasi atau refleksi dari dunia nyata. Stuart Hall menjelaskan bahwa representasi merupakan suatu proses yang menghasilkan makna dari ide-ide yang terdapat dalam pikiran individu. (Nugroho, 2023).

### Resepsi Stuart Hall

Teori resepsi berakar dari pemikiran Stuart Hall yang muncul pada tahun 1973, yang mengkaji proses pembuatan, produksi, distribusi, dan interpretasi pesan media. Fokus utama teori ini adalah pada peran penerima dalam memahami pesan, bukan pada pengirimnya. Dalam karyanya yang berjudul "Encoding and Decoding in The Television Discourse," Stuart Hall mengidentifikasi empat tahap dalam model komunikasi, yaitu produksi, sirkulasi, konsumsi, dan reproduksi (Natalie, 2022)..

Menurut sudut pandang Hall, penonton akan melalui proses mendeskripsikan sebuah karya yang telah dikodekan oleh penulis. Dalam konteks khusus ini, proses decoding mengacu pada proses kognitif yang dialami audiens ketika mereka menerima dan menafsirkan pesan. Dekoding mengacu pada proses kognitif dimana penerima menafsirkan pesan media fisik dalam bentuk yang dapat dimengerti (Morissan, 2015). Makna yang dihasilkan dibentuk oleh konteks sosial-budaya dan pengalaman individu dari masing-masing kelompok penerima. Dalam proses tersebut, terdapat tiga faktor spesifik yang mempengaruhi, Terdapat tiga elemen penting, yaitu kerangka pengetahuan, hubungan produksi, dan infrastruktur teknis (Hall dalam Sianturi, 2022).

Dalam teori ini, Hall kemudian mengembangkannya dan menetapkan bahwa khalayak akan memberikan tiga jenis reaksi. Pertama, dominant-hegemonic position atau dominant code.



Artinya, khalayak menerima begitu saja semua yang disampaikan media. Tidak ada daya tolak sedikitpun. Khalayak sepenuhnya setuju dengan semua yang ditayangkan media, baik atau buruk. Kedua, negotiated code. Analisis resepsi jenis ini menyatakan bahwa khalayak membandingkan sesuatu yang yang disampaikan televisi dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimilikinya. Pemaknaan dalam jenis ini terjadi campur baur antara yang dimiliki dan disampaikan media. Ketiga, oppositional code. Sedangkan posisi ini ber- banding terbalik dengan jenis yang pertama (dominant code) mencerminkan penolakan secara total terhadap tayangan media. Semua pemaknaan yang disampaikan media bertentangan dengan pemaknaan yang ada dalam benaknya (Morissan, 2015).

### **Makna**

Konsep makna, sebagaimana dijelaskan oleh Fisher (1986:343), merupakan ide abstrak yang telah menarik perhatian para filsuf dan ilmuwan sosial selama dua milenium terakhir. Sejak Plato memperkenalkan gagasan mengenai makna manusia sebagai cerminan dari "ultrarealitas", banyak pemikir terkemuka yang sering mengadopsi konsep ini dengan berbagai interpretasi. De Vito (1997) berpendapat bahwa makna berasal dari dalam diri manusia. Ia menekankan bahwa makna tidak terletak pada kata-kata, melainkan pada diri individu itu sendiri.

### **Film**

Definisi film yang paling mendasar adalah pemancaran gambar visual ke dalam layar yang besar. Dari sudut pandang yang lebih luas, gambar yang disiarkan melalui televisi juga dapat dianggap sebagai film (Cangara, 2002).

Menurut Hayyi (2021), Film dokumenter menyajikan informasi faktual dan menggambarkan realitas dengan menggunakan berbagai metode dan untuk berbagai tujuan. Demikian pula, audiovisual adalah media dinamis yang mampu mengubah suasana hati penonton. Media audiovisual adalah bentuk media yang mengeksplorasi dan menghubungkan antara pendengaran dan penglihatan. Media ini memiliki kemampuan untuk membangkitkan emosi dan memancing pemikiran bagi mereka yang mengalaminya (Yusantika, 2018).

Pengaruh dan karakteristik film selanjutnya dijelaskan oleh Quick dan La Bau serta McQuail (dalam Wahyuningsih, 2019:6-7). Sebagai media komunikasi audio-visual, film memiliki ciri khas yang unik dan sedikit berbeda dibandingkan dengan media lainnya, antara lain:

1. Memiliki dampak psikologis yang besar, dinamis, dan mampu mempengaruhi penonton.
2. Biasanya lebih dramatis dan lengkap daripada hidup itu sendiri.
3. Terdokumentasikan, baik gambar maupun suara.
4. Mudah distribusikan dan dipertunjukkan.
5. Mampu membangun sikap memperhatikan rasio dan emosi sebuah film.
6. Terilustrasikan dengan cepat dengan sebagai pengejawantahan dari sebuah ide atau sesuatu yang lain.
7. Interpretatif: mampu menghubungkan sesuatu yang sebelumnya tidak berhubungan.
8. Mampu menjual sebuah produk dan ide (sebuah alat propaganda yang
9. ampuh).
10. Mampu menjembatani waktu: baik masa lampau, sekarang, dan masa yang akan datang.
11. Mampu memperbesar dan memperkecil objek; dapat memperlihatkan sesuatu secara mendetail.
12. Dapat menunjukkan sesuatu yang kompleks dan terstruktur.
13. Berorientasi untuk ditampilkan kepada publik.
14. Bersifat internasional dan membawa ideologi tertentu.

### **Pemilu**

Pemilihan umum di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 adalah suatu mekanisme untuk melaksanakan kedaulatan rakyat secara langsung dan terbuka. Pemilihan umum dilakukan dengan cara yang bebas, rahasia, jujur, dan adil. Sasaran utama dari Pemilu adalah untuk memilih anggota Dewan



Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), serta Presiden dan Wakil Presiden. Di samping itu, Pemilu memiliki tujuan untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang akan mengisi posisi eksekutif di tingkat pusat, provinsi, serta kabupaten/kota, yang dikenal sebagai penyelenggara negara. (Sardini, 2015).

### **Kecurangan Pemilu**

Rafael Lopez-Pintor (2010) mengartikan kecurangan pemilu yaitu: “setiap tindakan yang diambil untuk mengutak-atik kegiatan Pemilu dan materi yang terkait dengan Pemilu untuk mempengaruhi hasil pemilihan, yang dapat mengganggu atau menggagalkan kehendak para pemilih”.

### **Isu-Isu Kecurangan Pemilu**

Menurut informasi yang diperoleh dari hukumonline.com, Hemi Lavour Febrinandez dari Themis Indonesia mengategorikan kecurangan pemilu menjadi tiga jenis pelanggaran, yaitu pelanggaran etika, pelanggaran administrasi, dan kecurangan yang tergolong sebagai tindak pidana. Ketiga jenis pelanggaran tersebut dapat mengakibatkan sengketa terkait hasil pemilu.

Berdasarkan laporan dari Media Indonesia, Ismail Fahmi, pendiri lembaga analisis Drone Emprit, menyatakan bahwa berbagai isu dan narasi mengenai kecurangan, pelanggaran, serta ketidakpuasan terhadap proses pemilu menunjukkan adanya ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem pemilu. Data yang dimilikinya menunjukkan bahwa 75% dari narasi tersebut bersifat negatif, termasuk tuduhan mengenai kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif dalam pemilu 2024.

Berdasarkan laporan pemantauan pemilu 2024 yang disusun oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Indonesia Corruption Watch (ICW), dan Themis Indonesia, terdapat beberapa permasalahan terkait kecurangan yang teridentifikasi sebagai berikut:

#### **1. Politik uang**

Terdapat banyak informasi dan laporan terkait praktik politik uang. Namun, seringkali informasi dan laporan tersebut tidak dilengkapi dengan bukti yang memadai. Hal ini menyebabkan kesulitan dalam melacak dan menindaklanjuti laporan pelanggaran pemilu. Dari 110 kasus dugaan kecurangan yang telah diidentifikasi, setidaknya 32 kasus (29%) merupakan dugaan praktik politik uang. Para pemantau berhasil menemukan 62% dari dugaan kecurangan politik uang tersebut, sementara sisanya terungkap melalui penelusuran di media sosial dan laporan media. Berbagai modus politik uang telah teridentifikasi, diantaranya:

- a. Penyerahan doorprize yang luar biasa, termasuk sepeda motor, sepeda listrik, paket umroh, mobil, rumah, kulkas, dan lain-lain.
- b. Distribusi minyak goreng dan paket sembako.
- c. Penawaran paket sembako dengan harga terjangkau (diskon/potongan harga).
- d. Pemberian uang tunai antara Rp50.000 hingga Rp500.000.
- e. Tawaran beasiswa yang dijanjikan dalam iklan kampanye.

#### **2. Penyalahgunaan fasilitas negara**

Penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan kampanye dilarang berdasarkan Pasal 280 huruf H UU Pemilu. Ketentuan ini berlaku tidak hanya untuk penyelenggara, peserta, dan tim kampanye, tetapi juga untuk pejabat negara serta pejabat daerah. Fasilitas negara yang dimaksud meliputi:

- a. Sarana mobilitas, seperti kendaraan dinas yang mencakup kendaraan dinas pejabat negara dan pegawai, serta alat transportasi dinas lainnya;
- b. Gedung kantor, rumah dinas, dan rumah jabatan yang dimiliki oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, serta pemerintah kabupaten/kota, kecuali untuk daerah terpencil yang pelaksanaannya harus mempertimbangkan prinsip keadilan;
- c. Sarana perkantoran, radio daerah, dan sistem komunikasi milik pemerintah provinsi/kabupaten/kota, serta peralatan lainnya; dan d. Fasilitas lain yang dibiayai oleh APBN atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.



Adapun bentuk-bentuk penyalahgunaan fasilitas negara yaitu: politisasi program bantuan pemerintah; politisasi pertemuan yang didanai negara; penggunaan mobil dinas untuk kampanye; kampanye terselubung dalam kegiatan yang didanai negara.

### 3. Netralitas dan profesionalitas penyelenggara pemilu

Kapasitas serta netralitas penyelenggara pemilu merupakan indikator krusial dalam mewujudkan pemilu yang berkualitas dan berintegritas. Dalam Pemilu 2024, penyelenggara pemilu menerapkan beberapa kebijakan yang menuai kontroversi dan memicu perdebatan. Selain mencerminkan sikap yang kurang profesional, fenomena ini juga mengindikasikan adanya masalah keberpihakan atau ketidaknetralan penyelenggara pemilu, baik di tingkat nasional maupun daerah.

### 4. Netralitas dan profesionalitas pejabat dan ASN

Temuan yang paling banyak muncul berkaitan dengan netralitas pejabat negara atau aparatur, mulai dari menteri, kepala daerah, Aparatur Sipil Negara (ASN), hingga kepala desa. Bentuk dan modus dugaan kecurangan bervariasi, antara lain:

#### a. Kepala desa:

- i. Melakukan politisasi dengan mendorong kepala desa untuk mendukung calon tertentu.
- ii. Kepala desa menunjukkan dukungan kepada calon presiden atau calon legislatif, misalnya melalui video, pose, atau keterlibatan aktif/pasif dalam kegiatan kampanye.
- iii. Kepala desa membagikan sembako kepada kepala RT/RW dengan menyertakan narasi dukungan terhadap calon presiden tertentu.
- iv. Kepala desa mengarahkan warga untuk memilih calon tertentu dengan ancaman penghentian distribusi bantuan sosial.

#### b. Menteri/kepala daerah/ASN

- i. Memberikan penjelasan mengenai kampanye calon presiden yang didukungnya dan mengakui bahwa ia tidak sedang cuti sebagai kepala daerah.
- ii. Menteri yang bukan peserta pemilu dan tidak terdaftar dalam tim kampanye, melakukan kampanye pada hari kerja.
- iii. Pejabat negara yang berkampanye dalam acara pemerintah..

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kualitatif, dengan metode yang diterapkan adalah analisis resepsi menurut Stuart Hall. Analisis resepsi ini menitikberatkan pada proses komunikasi massa (decoding) yang dilakukan oleh individu, yaitu cara seseorang dalam memahami dan menginterpretasikan media secara mendalam, serta makna pesan yang disampaikan, yang dipengaruhi oleh latar belakang dan pengalaman masing-masing. Pesan yang disampaikan oleh media terdiri dari berbagai tanda yang diinterpretasikan sebagai 'preferred reading'. Hall mengemukakan bahwa terdapat tiga perspektif atau posisi audiens dalam proses dekoding media, yaitu posisi dominan-hegemonik, posisi negosiasi, dan posisi oposisi.

### Informan Penelitian

Informan yang dipilih merupakan individu yang memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh peneliti, yaitu mahasiswa Ilmu Komunikasi angkatan 2020 dari Universitas Yudharta Pasuruan yang telah menonton film *Dirty Vote*, aktif dalam organisasi, serta telah berpartisipasi dalam proses pemilu. Dari kriteria tersebut, ditemukan lima informan yang sesuai, yaitu: SA, FN, ZM, MY, dan VR..

### Teknik Pengumpulan Data

Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data, termasuk wawancara mendalam, untuk menyelidiki makna teks media dari para informan. Data dari informan dan wawancara kemudian dicatat dalam catatan hasil wawancara. Selanjutnya, peneliti melakukan tinjauan pustaka terhadap buku, jurnal, dan sumber-sumber lainnya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN



Film *Dirty Vote* adalah sebuah film dokumenter ekplanatori. Film dokumenter adalah film non-fiksi, film yang merepresentasikan realitas kehidupan secara nyata (Bill Nichols, 2001: 1-2). Eksplanatori adalah bentuk dokumenter yang paling umum, yang sering digunakan dalam produksi dokumenter televisi. Narasi dan argumentasi logis diprioritaskan. Narator adalah pembicara tunggal dan sering disebut sebagai *Voice of God*, menjadikan narasi sebagai komponen penting dari narasi. (Ratmanto, 2018:405).

Film *Dirty Vote* disampaikan oleh tiga orang ahli hukum tata negara yaitu Bivitri Susanti, Feri Amsari, dan Zainal Arifin Mochtar. Film berdurasi 1 jam 57 menit 22 detik ini menjelaskan dugaan kecurangan pemilu 2024 yang sangat kasat mata dan sudah terdesain secara terstruktur, sistematis dan masif oleh pemilik kepentingan. Dugaan kecurangan pemilu itu dijabarkan melalui kumpulan data dan fakta dan diuraikan melalui kacamata politik dan hukum tata negara.

Setelah melakukan wawancara dengan subjek penelitian, yaitu mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Yudharta Pasuruan peneliti dapat menganalisis bagaimana pemaknaan mahasiswa terhadap 16 isu-isu kecurangan yang terdapat pada film *Dirty Vote* untuk dibandingkan dengan makna yang ingin disampaikan oleh sutradara/pembicara. Peneliti mencoba menganalisa data dari hasil wawancara dan menemukan bukti bahwa setiap informan memiliki pemaknaan dan penafsiran masing-masing setelah menonton film ini.

### **Pembahasan**

Hasil wawancara dengan kelima informan memberikan kesimpulan atas penerimaan atau resepsi terhadap 16 isu kecurangan yang ada di film *Dirty Vote*. Kelima informan memiliki beberapa persamaan dan perbedaan dalam memaknai film *Dirty Vote*. Perbedaan dalam pemaknaan film ini dikarenakan semua informan memiliki kerangka pengetahuan, pengalaman dan hubungan relasi yang berbeda (Hall dalam Sianturi, 2022).

Namun, dikarenakan kelima informan merupakan mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Yudharta Pasuruan, artinya mereka dalam ruang lingkup pendidikan yang sama, maka beberapa informan memiliki pemaknaan yang persis sama juga. Hal ini menciptakan *framework of knowledge* informan (Hall dalam Sianturi, 2022).

Secara keseluruhan, informan SA dan ZM menangkap semua pesan dalam film "*Dirty Vote*" dengan baik dan setuju dengan apa yang disampaikan oleh pembicara. Informan SA selalu setuju dengan yang disampaikan bahwa isu-isu kecurangan dalam film adalah benar adanya. Hal yang sama juga terjadi pada informan ZM. Dia tampak selalu sepakat dengan penjelasan dari pembicara dalam film. Sehingga ketiganya masuk pada posisi penerimaan dominan.

Pada informan FN dan VR, ada 1 dari 16 isu kecurangan yang disebutkan informan berada pada posisi negosiasi, sehingga secara keseluruhan informan FN dan VR dapat menerima pesan dan setuju bahwa yang disampaikan narasumber adalah kecurangan. Sebaliknya, dari 16 isu kecurangan, menurut informan MY 13 di antaranya bukanlah kecurangan. Sehingga dari pengamatan tersebut, informan FN berada pada posisi dominan sedangkan MY berada pada posisi oposisi.

Sesuai dengan teori Stuart Hall dimana setiap personal memiliki latar sosial budaya dan pengalaman yang berbeda sehingga mempengaruhi pemaknaan dan pemahaman masing-masing personal. Dari kelima informan, empat diantaranya memiliki pemaknaan yang sama dengan yang ada di film, bahwa isu-isu yang disampaikan merupakan kecurangan. Sedangkan satu di antaranya berpendapat bahwa isu-isu tersebut bukan kecurangan. Sehingga dari lima informan didapatkan hasil yaitu: satu informan berada dalam posisi oposisi dan empat lainnya berada dalam posisi dominan.

### **KESIMPULAN**

Penelitian tentang analisis resepsi merupakan penelitian yang berfokus pada hasil penerimaan khalayak dan pemosisian khalayak saat menerima pesan dari isi pesan yang dibangun oleh media. Peneliti menggunakan metode analisis resepsi mengambil informan



mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Yudharta Pasuruan yang telah menonton film *Dirty Vote*. melakukan pencarian data dengan wawancara dan menganalisis kelima informan, yaitu SA, FN, ZM, MY dan VR, terdapat beberapa hal yang dapat peneliti simpulkan.

1. Berdasarkan kelima informan, film *Dirty Vote* dianggap sebagai film edukasi dimana informan SA, FN, ZM, dan VR setuju ada kecurangan sedangkan informan MY tidak setuju adanya kecurangan dan menganggap film ini film propaganda politik. Informan sebagai penonton atau khalayak meresepsikan isu-isu kecurangan yang disampaikan oleh film *Dirty Vote* dipengaruhi oleh dua faktor yang telah diungkapkan Stuart Hall yaitu kerangka pengetahuan dan relasi produksi. Pemaknaan informan dipengaruhi oleh pengetahuan, pengalaman, latar belakang sosial ekonomi, lingkungan serta pandangan politik. Resepsi kelima informan dalam penelitian ini dipengaruhi oleh informasi yang diperoleh dari media lain, pengaruh keluarga dan lingkungan, pengalaman yang dialami oleh narasumber serta pandangan politik.
2. Dari kelima informan, informan SA, FN, ZM dan VR berada dalam posisi dominan sedangkan informan MY berada dalam posisi oposisi. Sehingga berdasarkan hasil analisis, peneliti menemukan bahwa secara keseluruhan informan hanya terbagi dalam 2 posisi penerimaan. Posisi penerimaan dari masing-masing informan, yaitu:
  - a. Posisi Dominan  
Informan yang sejalan dengan apa yang disampaikan encoder, bahwa isu-isu yang ada di dalam film *Dirty Vote* adalah kecurangan. Informan yang menyetujui ini disebabkan oleh persamaan pengalaman dan pengetahuan dengan encoder (kerangka pengetahuan).
  - b. Posisi Oposisi  
Informan yang tidak sejalan dengan apa yang disampaikan encoder, bahwa isu-isu dalam film *Dirty Vote* bukanlah kecurangan. Informan tidak menyetujui disebabkan oleh pengaruh lingkungan (relasi produksi).

## SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan yang didapatkan oleh peneliti, ada beberapa saran yang peneliti anggap penting, yaitu:

1. Untuk masyarakat diharapkan lebih peka terhadap isu-isu politik terutama pada kebijakan-kebijakan pemerintah serta fenomena-fenomena politik menjelang pemilu.
2. Untuk peneliti selanjutnya khususnya pada mahasiswa di jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Yudharta Pasuruan yang tertarik melakukan penelitian dengan menggunakan teori resepsi Stuart Hall, diharapkan agar dapat meneliti lebih dalam dengan menggunakan film yang lebih berfokus pada latar belakang seseorang seperti nilai-nilai kebudayaan atau sosial ekonomi. Selain itu diharapkan untuk mencari informan dengan latar belakang yang lebih beragam agar lebih menarik dan unik. Diharapkan juga memilih informan yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang selaras dengan topik yang diteliti.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Bentham, D dan Boyle, K. (2000). *Demokrasi*. Yogyakarta: Kanisius
- Caroeboka, R. M. (2017). *Konsep dan Aplikasi Ilmu Komunikasi*. Yogyakarta: ANDI
- Erianto. (2008). *Komunikasi Sebagai Wacana*. Jakarta: LKis
- Hufon dan Hadi, S. (2016). *Ilmu Negara Kontemporer: Telaah Teoritis Asal Mula, Tujuan dan Fungsi Negara, Negara Hukum dan Negara Demokrasi*. Yogyakarta: Laksbang Grafika
- Kusnardi dan Harmaily, I. (1998). *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: PSHTN-FHUI
- McQuail, D. (1996). *Teori Komunikasi Massa: Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.



- Moleong, L. J. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Santoso, T., Budhiati, I. (2019). *Pemilu di Indonesia: kelembagaan, pelaksanaan, dan pengawasan*. Indonesia: Sinar Grafika.
- Sardini, N. H. (2015). *Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu*. 1st ed. LP2AB. Jakarta Timur.
- Sobur, A. (2009). *Analisis Teks Media*. Bandung: Remaja Rosdakarya. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (1st ed.). Bandung: Alfabeta
- Surbakti, A. R. (2008). *Perekayasaan Sistem Pemilu Untuk Membangun Tata Politik Demokratis*. Jakarta: Kemitraan
- Tutik, Titik Triwulan. (2006). *Pengantar ilmu hukum / Titik Triwulan Tutik ; editor, Harsono*. Jakarta : Prestasi Pustaka.
- Wahyuningsih, S. (2019). *Film dan Dakwah: Memahami Representasi Pesan-Pesan Dakwah Dalam Film Melalui Analisis Semiotika*. Surabaya: Media Sahabat Cendekia.

#### E-Book

- Andhita, P. R. (2021). *Komunikasi Visual*. Zahira Media Publisher. [http://books.google.ie/books?id=ico5EAAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=Andhita,+Pundra+Rengga.+\(2021\).+Komunikasi+Visual&hl=&cd=1&source=gbs\\_api](http://books.google.ie/books?id=ico5EAAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=Andhita,+Pundra+Rengga.+(2021).+Komunikasi+Visual&hl=&cd=1&source=gbs_api)
- Fachrudin, A. (2017). *Dasar-dasar Produksi Televisi: Produksi Berita, Feature, Laporan Investigasi, Dokumenter dan Teknik Editing*. Kencana. [http://books.google.ie/books?id=0KRPDwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=Fachrudin,+Andi.+\(2017\).+Dasar-dasar+Produksi+Televisi:+Produksi+Berita,+Feature,+Laporan+Investigasi,+Dokumenter+dan+Teknik+Editing.+Kencana,&hl=&cd=1&source=gbs\\_api](http://books.google.ie/books?id=0KRPDwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=Fachrudin,+Andi.+(2017).+Dasar-dasar+Produksi+Televisi:+Produksi+Berita,+Feature,+Laporan+Investigasi,+Dokumenter+dan+Teknik+Editing.+Kencana,&hl=&cd=1&source=gbs_api)
- Hall, Stuart. (1973). *Encoding and Decoding in the television discourse*. <https://www.semanticscholar.org/paper/Encoding-and-Decoding-in-the-television-discourse-Hall/9d8d680436345535ae2598f9e6786c68d4143f9>
- Susilastuti DN, S. D., Suparno, B. A., Susilarti, E., Sihono, S., Hudono, H., & Indarwanta, D. (2010). *Pengantar Ilmu Politik Membedah Paradigma Politik Di Indonesia (Teori dan Praktek)*. <http://eprints.upnyk.ac.id/33699/1/Cover%20%26%20Buku%20Ajar%20Disinformasi%20Berita%20Politik.pdf>

#### Jurnal

- Hashibuan, S. A. (2023). Sistem Pemilihan Umum dalam Kaitan dengan Negara Demokrasi. *Majalah Ilmiah Warta Dharmawangsa*, 17(2), 602–609. <https://doi.org/10.46576/wdw.v17i2>
- López-Pintor, R. (2010). Assessing electoral fraud in new democracies: A basic conceptual framework. *Washington DC International Foundation for Electoral Systems: White Paper Series Electoral Fraud*.
- Natalie, M. B., Putra, F. W., & Rossafine, T. D. (2022). Studi Tokoh Utama Film Mulan: Analisis Resepsi terhadap Hegemoni Maskulinitas. *Calathu: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 4(1), 68–75.
- Ratmanto, A. (2018). Beyond the historiography: Film dokumenter sejarah sebagai alternatif historiografi di Indonesia. *SASDAYA: Gadjah Mada Journal of Humanities*, 2(2), 405-414.
- Rezkia, F., Abidin, S., & Muary, R. (2022). Analisis framing “Zero tolerance” Pada film Indonesia: Diversity under threat di youtube DW documentary. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(4), 2201-2211.
- Schmälzle, R., & Huskey, R. (2023). Integrating media content analysis, reception analysis, and media effects studies. *Frontiers in Neuroscience*, 17, 1155750.
- Sukriono, D. (2009). Menggagas sistem pemilihan umum di Indonesia. *Konstitusi Jurnal*, 2(1), 8.
- Sukriono, Didik. 2009. “Menggagas Sistem Pemilihan Umum di Indonesia”. *Jurnal Konstitusi*. Jakarta: diterbitkan Mahkamah Konstitusi RI mitra Universitas Kanjuruhan Malang. Vol. II, No.1, Juni 2009



Veri Junaidi. (2009). Menata Sistem Penegakan Hukum Pemilu Demokratis Tinjauan Kewenangan MK atas Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU). *Jurnal Konstitusi*. 6(3).

### Internet

Dirty Vote. (2024, February 11). *DIRTY VOTE - Full Movie (OFFICIAL Channel)* [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=RRgLZ66NCmE>, diakses tanggal 25 April 2024.

Hukumonline, T. (2024, April 5). Demokrasi: Sejarah dan Pelaksanaannya di Indonesia. *hukumonline.com*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/demo-kra-si-t61b739dbb5bf8>, diakses tanggal 27 April 2024.

Yahya, A. N. (2024, February 12). Polemik Film "Dirty Vote" Menjelang Hari Pemungutan Suara Halaman all - Kompas.com. *KOMPAS.com*. [https://nasional.kompas.com/read/2024/02/12/14153661/polemik-film-dirty-vote-menjelang-hari-pemungutan-suara?page=all#google\\_vignette](https://nasional.kompas.com/read/2024/02/12/14153661/polemik-film-dirty-vote-menjelang-hari-pemungutan-suara?page=all#google_vignette), diakses tanggal 29 April 2024.